

RETORIKA PEMBERITAAN DEKRET POLITIK GUS DUR DALAM BINGKAI ANALISIS WACANA KRITIS TEUN A. VAN DJIK

Ferry Sandriya

Universitas Brawijaya Malang
ferryallen88@gmail.com

Abstrak. Analisis Wacana Kritis model Teun A. van Dijk dalam dekret kenegaraan yang disampaikan oleh Gus Dur yang berisi tiga aspek penting diantaranya struktur makro, mikro dan kognisi sosial. Gus Dur sebagai politikus Indonesia dan memiliki posisi yang strategis sebagai ketua PBNU. Pada waktu itu Gus Dur sebagai ketua PBNU yang mana belum ada orang yang berani mengkritik kebijakan pemerintah yang memiliki kinerja lemah. Penelitian ini memilih dekret presiden yang dikaji melalui studi analisis wacana kritis. Hasil dari studi ini menunjukkan bahwa dekret yang dikeluarkan oleh presiden keempat RI yang rilis pada tanggal 28 Mei 2001 dan 23 Juli 2001 adalah bentuk retorika Gus Dur untuk menyelamatkan Indonesia. Kritik dan pembelaan yang disampaikan Gus Dur pada dekretnya mengharapkan kesinergian antara elemen pemerintah dan masyarakat. Presiden ke 4 Republik Indonesia (Gus Dur) dikenal lebih mementingkan kebutuhan Rakyat, indikasi ini tertera pada isi pidatonya yang dominan merujuk pada kemajuan bangsa dan Negara.

Kata kunci: retorika pemberitaan, analisis wacana kritis, dekret politik

Abstract. Critical Discourse Analysis of the Teun A. van Dijk model in the state decree delivered by Gus Dur which contains three important aspects including macro, micro and social cognition structures. Gus Dur as an Indonesian politician and has a strategic position as chairman of PBNU. At that time, Gus Dur was the chairman of PBNU, where no one dared to criticize government policies that had weak performance. This study selects presidential decrees which are studied through critical discourse analysis studies. The results of this study indicate that the decrees issued by the fourth president of the Republic of Indonesia which were released on May 28, 2001 and July 23, 2001 are a form of Gus Dur's rhetoric to save Indonesia. The 4th President of the Republic of Indonesia (Gus Dur) is known to be more concerned with the needs of the people, this indication is contained in the content of his speech which predominantly refers to the progress of the nation and state.

Keywords: news rhetoric, critical discourse analysis, political decree

PENDAHULUAN

Gus Dur merupakan presiden keempat Republik Indonesia yang dikenal sebagai Ulama karismatik dan politikus kontroversial. Pelabelan ini dikarenakan Gus Dur memiliki posisi yang strategis yaitu sebagai Ketua PBNU yang notabennnya sebagai organisasi masyarakat tradisonal terbesar di Indonesia bahkan dunia. Selain itu, Gus Dur dikenal sebagai kritikus pemerintah yang sangat konsisten ditengah sedikit sekali orang yang berani mengkritik pemerintah saat itu. (Ervina, 2019) Sikap kontrovesinya Gus Dur tetap berlanjut seiring menjabat sebagai presiden yang notabennnya pemimpin tertinggi di pemerintahan Indonesia. Menurut (Aliansyah, 2014) Salah satu sikap kontroversi Gus Dur adalah menganggap anggota DPR “tempat bermain taman kanak-kanak”, membubarkan departemen sosial dan pencerahan dan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) yang ahirnya berujung pemakzulan sebagai Presiden.

(AWK) Analisis Wacana Kritis adalah salah satu prespektif untuk mendeteksi dan membantu memberikan pemahaman lebih detail bahwa bahasa pada perubahan dinamisnya model menganalisis bahasa tidak hanya dari segi struktur tetapi juga memiliki peranan penting dalam kehidupan sosial masyarakat. (Dewi, 2019) Jadi Analisis Wacana Kritis ini adalah tipe analisis yang menitikberatkan sebuah kajian/studi untuk mengetahui bagaimana penyalahgunaan

kekuasaan, ketidaksetaraan dibuat, dominasi diproduksi dan ditolak baik secara lisan maupun teks dalam konteks social dan politik. Wacana juga dapat dibentuk melalui berbagai maksud oleh penutur kepada lawan tuturnya. Banyak Cara untuk mengetahui suatu maksud, konteks/realitas pada bahasa yang mempunyai makna implisit adanya kepentingan, power dominan, tujuan tertentu dan ideologi membutuhkan kepekaan dalam menganalisis teks atau wacana. (Djik, 1977) Memahami teks dan koteks pada intinya mempelajari tentang bagaimana cara para pemakai bahasa menjelaskan bagaimana hubungan diantara konstruksi tekstual dengan kondisi-kondisi institusional, social, & ideologis dalam proses produksi dan resepsinya. (Sulistiyo, 2018)

Adapun penelitian sebelumnya dilakukan oleh (Ervina, 2019) yang berjudul *kontroversi gaya komunikasi politik KH. Abdurrahman Wahid* dengan menggunakan Analisis Wacana Kritis Teun A. van Dijk untuk mengetahui maksud yang eksplisit pada pidato-pidato politik yang disampaikan pada era kepemimpinan KH Abdurrahman Wahid. Peneliti menganalisis secara mendetail pidato tersebut melalui pendekatan ilmu komunikasi. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh (Putri, 2018) yang berjudul “*Argumentation in Political Interview: Critical Discourse Analysis of Abdurrahman Wahid’s Controversial Regime*” penelitian tersebut menganalisis mikro struktur yang terdiri dari *Illocusioanary Act*. Interview dilakukan dengan wawancara politik untuk berbicara tentang pemecatannya dan parlemen yang menentanginya. Selain menarik memotret dari sisi politikus, dia juga memberi nama kabinet pada masa pemerintahannya dengan nama kabinet persatuan nasional. Maksud dari nama kabinet tersebut sesuai dengan tujuannya yaitu menyatukan seluruh elemen bangsa yang mana saat itu menjadi ancaman disintegrasi bangsa. Fenomena kontroversial ini sangat menarik untuk diteliti, karena jika disandingkan dengan teori (Neustadt, 1991) yang menyatakan bahwa kekuatan presidensial (seorang presiden) bersifat persuasif. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui fenomena struktur apa yang ada dalam dekret politik Gusdur. 1. Maksud explicit apa yang disampaikan Gus Dur pada dekritnya? 2. Unsur apa saja yang ada pada dekrit Gus Dur?

Sesebagai langkah awal untuk memahami struktur dekret Gus Dur yang dikenal sebagai politikus kontroversional sekaligus ulama karismatik, peneliti juga mendapat gambaran dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Yanti, Dkk 2019) yang berjudul “Analisis Wacana Kritis Teun A. van Dijk pada Teks Pidato Klaim kemenangan Pilpres 2019”. Maka muncullah ide peneliti untuk membuat kerangka berfikir untuk lebih memudahkan dalam menelaah isi pidato dan mempermudah proses meneliti teks. Berikut adalah skema yang dibuat peneliti untuk memudahkan langkah penelitian ini.

Kehadiran Analisis Wacana Kritis tidak hanya fokus pada satu kajian saja, tetapi multi kajian atau bisa disebut multi kajian. AWK ini diantaranya dipelopori oleh Teun A. van Dijk, Teun van Leeuwen, Norman Fairclough & Ruth Wodak ini, memberikan pengarahannya dalam penelitian yang berkaitan dengan analisis wacana yang meliputi pembelaan terhadap suatu kelompok, termarginal atau perihal kesetaraan, perbedaan kelas social, rasisme, kekuasaan dan lain sebagainya. Dari sisi Kebahasaannya AWK (analisis wacana kritis) mengkaji bukan hanya struktur makro bahasa dan struktur mikro bahasa tetapi ideologi dan kekuasaan yang membangun struktur bahasa. Pendekatan AWK atau CDA ini menjadi sangat relevan mengingat serbuan informasi melalui berbagai media semakin gencar. Untuk mengkaji lebih detail suatu bahasa yang digunakan untuk mewakili politik tertentu atau kelompok sosial yang berpengaruh dan dapat memunculkan peristiwa-peristiwa yang dianggap relevan untuk ditayangkan, akan condong digunakan oleh kelompok social sebagai cara untuk membicarakan kelompok atau kejadian tertentu. (Widodo, 2018)

Selanjutnya analisis wacana kritis sebagai paradigma merupakan suatu upaya untuk mengetahui lebih dekat bagaimana makna/pesan yang ada dalam suatu teks atau wacana dapat dipahami dan diorganisasikan. Dalam ruang lingkup politik, analisis wacana kritis menjadi titik sentral penggunaan bahasa. Karena bahasa merupakan bagian terpenting dalam penggambaran suatu partisipan atau objek tertentu dan ideology yang terkandung didalamnya. Untuk lebih

memperjelas arah wacana kritis yang sudah dicetuskan oleh para ahli yang meliputi studi wacana, kekuasaan, domiasi, dan posisi analisis wacana dalam social, oleh sebab itu analisis wacana kritis juga disebut analisis wacana kritis model socio-kognitif. (Sarasati, 2019)

Dari definisi di atas Van Dijk memandang analisis wacana kritis sebagai studi multidisipliner. Oleh karena itu analisis wacana kritis memiliki ruang lingkup yang sangat luas. Van Dijk tidak hanya fokus pada struktural atau dari segi tekstual, melainkan juga dapat memperjelas level produksi, pemahaman atau resepsi. Sedangkan pada tingkat mikro struktur, analisis wacana kritis difokuskan pada bagian semantik antara proposisi, leksikal, sintaksis dan elemen retorika lainnya; kutipan, laporan langsung atau tidak langsung. Dari studi Van Dijk pada tingkat mikro maupun makro sering digunakan untuk menganalisis atau menyelidiki wacana kritis yang meliputi prespektif; konteks (historis, politik, konflik dan aktor atau latar belakang yang terlibat), kelompok (kekuasaan dan konflik yang terjadi), menyelidiki opini positif & negatif dan mengungkap makna implisit dan eksplisit.

METODOLOGI

Untuk mengetahui sosok KH Abdurrahman Wahid (Presiden ke 4 Republik Indonesia) yang dikenal sebagai politikus yang kontroversional dan karismatik, tentunya mempunyai gaya bahasa sendiri dalam menyampaikan pidato –pidatonya nya selama menjabat Presiden Republik Indonesia yang ke 4. Sikap kontroversinya masih melekat pada dirinya yang notaben adalah pemimpin pemerintahan tertinggi di Indonesia. Oleh karena itu dibutuhkan metode diskriptif kualitatif dan metode telaah isi untuk mengungkap fenomena dekret kontroversial KH Abdurrahman Wahid pada era kepemimpinannya. Penelitian diskriptif kualitatif adalah dokumentasi mengelola data atau mencari variabel/ hal-hal yang berbentuk catatan, transkrip dan lainnya (Creswell, 2014). Metode ini juga berfungsi untuk mengelompokkan data-data yang sesuai dengan teori yang diinginkan oleh peneliti. Data-datanya juga bisa berbentuk teks, foto/gambar, video, objek seni dan segala jenis bunyi atau suara. Penelitian kualitatif lebih fokus pada proses bukan hasil. Proses pengumpulan data bisa dilakukan dengan studi pra lapangan, wawancara dan observasi partisipasi.

Kemudian didukung oleh metode telaah isi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menyelidiki/ memeriksa isi dari suatu teks wacana. Metode ini sangat efektif untuk mendapatkan banyak data tentang teks, wacana atau berita untuk mendapatkan pesan baik secara implisit atau secara eksplisit. (Humaira, 2018) Instrumen pengambilan data pada penelitian ini dengan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, teks dekret Gus Dur yang diambil dari Liputan6.com Jakarta, Oke News & Tempo.CO. Kedua, mengeksplorasi teks melalui struktur makro untuk mengetahui secara umum topik/ tema dekret yang mana didalamnya terkandung point-point penting yang merujuk pada tema besarnya. Kemudian dari segi struktur mikro untuk menginterpretasikan keterkaitannya elemen wacana yang meliputi; aspek semantik (latar, detail & maksud), sintaksis (suatu bentuk kalimat aktif atau pasif, kata ganti koherensi dan nominalisasi), stilistik/leksikon dan retorik (grafis, metafora & ekspresi). Kemudian yang terakhir dari segi kognisi social untuk mendeteksi maksud yang terselubung atau ideology yang terkandung dalam teks dekret KH Abdurrahman Wahid (Presiden ke 4 Republik Indonesia) (Musyafa'ah, 2017)

PEMBAHASAN

Struktur Makro

Oke News - **Senin 23 Juli 2018 11:14 WIB** yang berjudul “Gus Dur sudah ingin dilengserkan sebelum meski dekret belum dikeluarkan” seluruh elemen yang kontra dengan kepemimpinan Gus Dur sudah menyiapkan rencana jauh-jauh hari untuk melengserkannya. Sebagai presiden keempat RI pasca reformasi, Gus Dur terkenal sebagai politikus yang berani menentang arus pernyataan dan kebijakan pemerintahan di zamannya. Namun, hal itu membuat elit-elit politik Indonesia tidak tenang. Pelengseran Gus Dur mulai direncanakan oleh sejumlah

tokoh politik sejak adanya isu kasus dana Bulog dan bantuan dari Sultan Brunei. Hal tersebut tidak berhasil menjadikan bukti yang konkrit untuk menjatuhkan Gus Dur dari kursi kepresidenan. Dengan begitu sangat jelas bahwa mereka (elite politik) menggunakan segala cara untuk menjatuhkannya. Kegagalan elit politik dalam menjatuhkan Gus Dur melalui isu Bulog dan Bantuan Dana dari Sultan Brunei tidak membuat para elite politik jera justru mereka terus mencari celah dan akhirnya mereka merencanakan sidang istimewa. Topik (makro struktur) yang diberitakan oleh Oke News menjadi landasan bahwa kontroversi seorang Gus Dur diinterpretasikan oleh banyak orang dalam konteks dekrit. Adapun tujuan dari dikeluarkannya dekrit adalah untuk menyelamatkan Indonesia.

Fenomena kontroversi memang sudah melekat pada Gus Dur Juga diinterpretasikan oleh banyak pihak dalam konteks dekrit. Sedangkan secara kontekstual rilisnya dekrit adalah menyelamatkan Bangsa Indonesia. Tepat pada Senin 23 Juli 2001 pukul 01.30 WIB menjadi saksi bersejarah yang kedua kalinya Presiden RI mengeluarkan dekrit (setelah Bung Karno pada 5 Juli 1959) yang endingnya membuat dirinya tergulingkan dari kursi Presiden ke-4 RI. Pada dekrit tersebut terdiri dari poin-poin penting sebagai berikut; 1. Membekukan DPR dan MPR 2. Mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat, mengambil tindakan dan menyusun badan yang diperlukan untuk melaksanakan pemilihan umum dalam waktu 1 tahun. 3. Menyelamatkan gerakan reformasi total dari hambatan unsur-unsur orde baru serta membekukan partai Golkar dengan menunggu keputusan Mahkamah Agung. Tujuan dekrit 23 Juli 2001 ini agar sidang MPR tidak terlaksana, alasannya menurut penilaian Gus Dur sidang istimewa MPR tidak konstitusional. Lebih lanjut (Qodar, 2001) menjelaskan bahwa posisi Presiden sebagai kepala Negara dalam sistem parlementer tidak bisa digulingkan oleh parlemen, tetapi justru yang berwenang Presiden yang dapat membubarkan DPR dengan alasan DPR tidak lagi dapat mewakili sebagaimana sesuai dengan fungsinya sebagai wakil Rakyat.

Dekret berikutnya (Rurit, 2001) pada tanggal 28 Mei 2001 semenjak menjabat sebagai presiden adalah bentuk reaksi tidak setuju terhadap parlemen DPR yang merupakan retorika politik Gus Dur. Retorika juga disebut sebagai *Statis* dalam ranah *Inventio* yang menjadi isu konfliktual. Kemudian dalam wacana sidang istimewa, retorika presiden difungsikan untuk menolak gagasan yang muncul dari permintaan DPR kepada MPR atas kasus Buloggate dan Bruneigate yang menimpa Gus Dur, Gus Dur diminta pertanggungjawaban atas kedua kasus tersebut. (Haramain, 2014) Alasannya Gus Dur tidak setuju dengan sidang istimewa yang diselenggarakan oleh MPR tersebut karena tidak konstitusional. Lanjut (Mahfud, 2003) menjelaskan bahwa posisi presiden sebagai pimpinan Negara dalam sistem parlementer dijatuhkan langsung oleh pihak parlemen (DPR) justru presiden yang mempunyai power yang kuat untuk menjatuhkan atau membubarkan DPR dengan alasan DPR tidak lagi dapat mewakili, sebagaimana mestinya fungsi DPR sebagai wakil rakyat.

Struktur Mikro

Dilansir dari Liputan6.com Jakarta pada tanggal 23 Juli 2001: Dekret Presiden, Perlawanan Parlemen dan Celana pendek Gus Dur. Tepat pada era kepemimpinan Gus Dur menjadi catatan bersejarah yang kedua kalinya Presiden Indonesia mengeluarkan Dekret (setelah Presiden Soekarno pada 5 Juli 1959) Saat hari masih gelap, Gus Dur mengeluarkan dekrit yang pada akhirnya justru membuat dirinya terguling dari kursi Presiden ke-4 RI. Pemberlakuan dekrit secara terang-terangan ditanggapi keras oleh lawan-lawan politiknya Megawati Soekarno putri yang saat itu menjabat sebagai Wakil Presiden juga tidak setuju dengan langkah yang diambil cucu pendiri ormas Islam terbesar, Nahdlatul Ulama (NU) itu. Pimpinan parlemen dan elite politik langsung melakukan perlawanan dengan menggelar konferensi pers. Amien Rais yang saat itu menjabat sebagai Ketua MPR mengajak seluruh masyarakat memboikot isi dekrit. Sementara sidang istimewa MPR yang semula akan digelar pada 1 Agustus 2001 dipercepat menjadi hari itu juga atau Senin siang.\

Dengan demikian isi dari Dekret Gus Dur dapat diinterpretasikan melalui Makna lokal (*semantic*) yang mengarah pada makna pada isi dekrit yang menyatakan bahwa “*presiden akan membekukan DPR & MPR*” yang kemudian menimbulkan pro dan kontra serta perdebatan dari berbagai pihak, dan ingin memberikan kedaulatan sepenuhnya ke tangan rakyat, sebagaimana ideology pancasila yang dipegang teguh oleh Gus Dur. Sebenarnya tujuan dari pembekuan DPR & MPR bertujuan untuk menggagalkan sidang istimewa. Inti dari sidang istimewa pada saat itu bertujuan untuk pemakzulan presiden oleh DPR RI & MPR RI. Mereka pada saat itu memberikan alasan bahwa suhu politik yang sangat genting dan dibawah control sehingga perlu ada pemimpin baru. Hal ini juga ditegaskan oleh Amin Rais yang pada saat itu sebagai ketua MPR RI. Secara akademis presiden mengeluarkan dekrit yang berdasarkan dengan suatu tindakan darurat serta berkaitan dengan keselamatan bangsa atau Negara dari kehancura, seperti adanya integritas, maka sangat jelas keberpihakan kepada bangsa dan keutuhan NKRI menjadi tujuan utama dari dekrit sebagaimana pancasila sebagai ideologi bangsa dan Negara.

Inti dari teks yang signifikan pada dekrit ini, mulai dari dekrit yang dikeluarkan oleh presiden pada tanggal 23 Juli 2001 dapat diidentifikasi adanya kebuntuan politik yang diakibatkan oleh krisis konstitusional berkepanjangan serta berdampak pada krisis ekonomi dan pertikaian politik kekuasaan sebagai penyebabnya membuat ketentuan yang ada dalam perundang –undangan diabaikan. Dengan adanya personifikasi sebagai presiden, Gus Dur kokoh memegang prinsipnya dengan menjadikan pancasila sebagai ideologi untuk tidak membiarkan bangsa terpecah belah dan menjunjung tinggi keutuhan NKRI. Retorika yang terkandung dalam teks dekrit terdapat pesan-pesan yang menggunakan istilah-istilah agar pesan yang disampaikan menjadi efektif, memberi tekanan, keseriusan dan menimbulkan efek ketegasan yang tidak dapat ditawar lagi dan semua itu tersaji dalam istilah berikut ini: “membekukan DPR & MPR”, “mengembalikan kedaulatan pada rakyat”, “mengambil tindakan”, “menyusun badan yang diperlukan untuk menyusun pemilu untuk waktu satu tahun”, “menyelamatkan reformasi total dari unsur orde baru” “membekukan partai Golkar” dan “menunggu keputusan Mahkamah Agung”.

Kognisi Sosial

Van Dijk menegaskan analisis kognisi sosial bertujuan untuk mengetahui teks diproduksi, kesadaran mental penulis/wartawan dalam membentuk teks. Untuk mendeteksi pesan / makna yang tersirat pada suatu teks maka dibutuhkan analisis kognisi sosial. Pada teks dekrit Gus Dur menunjukkan suatu protes atau kritik kepada elemen pemerintah yang tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya. Logika teks yang terdapat pada teks ini dapat diidentifikasi bahwa di era pemerintahan Gus Dur mengalami kebuntuan politik dan krisis konstitusional. Presiden keempat RI secara demokratis dipilih oleh MPR dengan total suara terbanyak, tetapi berujung yang dimakzulkan oleh MPR. Secara teori pemakzulan presiden di Indonesia harus memiliki kriteria seperti korupsi, berbuat maksiat, melanggar hukum dan sejenisnya. MPR memakzulkan Gus Dur secara tiba-tiba tanpa dipanggil terlebih dahulu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Gus Dur menjadi contoh yang konkrit oleh seluruh pihak bahwa politisi dan negarawan pada saat itu memiliki “lidah tak bertulang”. Berdasarkan UUD 1945 proses pemakzulan presiden tidak mudah karena harus melalui jalur hukum yang panjang. Indonesia pada saat itu tidak menunjukkan karakternya sebagai Negara hukum yang sempurna.

Fenomena kontroversi ini jika disandingkan dengan teori Neustadt yang menyatakan bahwa persuasi pemimpin Negara tidak mengarah pada karisma dan argumentasi dasar yang dimiliki atau sekedar memerintah saja, namun lebih relevan jika dilakukan persuasi. Ricard Neustard (1991) juga memperjelas dalam tulisannya tentang kekuatan preside di Amerika mengatakan bahwa, kekuatan presidensil adalah kekuatan memersuasi. Tujuan dari persuasi ini adalah untuk mencapai kesepakatan antar pihak lain. Dalam hal ini persuasi yang diterapkan oleh Presiden akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar, karena ada kewenangan dan status presiden terhadap kebijakan yang dibuatnya. Sedangkan dalam konteks Gus Dur sebagai

pimpinan Negara Indonesia pada waktu itu justru sering mengundang perdebatan, seakan-akan keputusan atau tindakan yang diambil oleh Gus Dur sering kali terjadi kendala-kendala yang tidak sinergi dengan pihak lain, sehingga terjadi gap antara pihak yang berkepentingan.

PENUTUP

Hasil penelitian model Teun A. van Dijk pada dekret Presiden keempat RI yang dideteksi melalui tiga aspek: struktur makro, struktur mikro dan kognisi sosial. Beliau merupakan tokoh kontroversi. Di era kepemimpinannya selalu menimbulkan pertanyaan besar dan memiliki beragam makna bahkan sikap kontroversinya sudah dilakukan semenjak era kepemimpinan Soeharto. Pada waktu itu Gus Dur sebagai ketua PBNU yang mana belum ada orang yang berani mengkritik kebijakan pemerintah yang memiliki kinerja lemah. Penelitian ini memilih dekret presiden yang dikaji melalui studi analisis wacana kritis. Hasil dari studi ini menunjukkan bahwa dekret yang dikeluarkan oleh presiden keempat RI yang rilis pada tanggal 28 Mei 2001 dan 23 Juli 2001 adalah bentuk retorika Gus Dur untuk menyelamatkan Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Aliansyah, M. A. (2014, Maret Sabtu). *Kisah Gus Dur pakai celana pendek & Sisi Lain Istana*. Retrieved from Merdeka.com: <https://www.merdeka.com/peristiwa/kisah-gus-dur-pakai-celana-pendek-sisi-lain-istana.html>
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design Qualitative, Quantitative and Mix Methods Approches*. Washington DC: SAGE Publications, Inc.
- Dewi, D. (2019). “Analisis Wacana Kritis Teun A. Van Dijk Pada Teks Pidato Klaim Kemenangan Pilpres 2014”. *Jurnal Imiah Pendidikan dan Pembelajaran*, 2.
- Dijk. (1977). *Text and Context Explorations in the semantics and pragmatics of discourse*. USA: Longman Group Ltd.
- Dijk, T. A. (1877). *Text and Context Explorations in the semantics and pragmatics of discourse*. USA: Longman Group Ltd.
- Ervina, D. (2019). “Kontroversi Gaya Komunikasi Politik Presiden”. *Jurnal Ilmu Komunikasi Mediakom*, 2.
- Haramain, M. (2014). *Gus Dur, Militer dan Politik*. Yogyakarta: LKiS.
- Humaira, H. W. (2018). “Analisis Wacana Kritis (Awk) Model Teun A. Van Dijk Pada Pemberitaan Surat Kabar Republika”. *Jurnal literasi vol.1 No 1*, 4.
- Mahfud, M. (2003). *Krisis Masa Kini dan Orde Baru*. Jakarta: Yayasan Obor.
- Musyafa’ah, N. (2017). Analisis Wacana Kritis Model Teun A. Van Dijk “Siswa Berprestasi Jadi Pembunuh”. *MODELING: Jurnal Program Studi PGMI*, 209.
- Neustadt, R. (1991). *Presidential Power and the Modern President: The politics of leadership from Roosevelt to Reagan*. New York: John Wiley & amp; Sons.
- Ni Putu Dewi Eka Yanti, D. (2019). “Analisis Wacana Kritis Teun A. Van Dijk Pada Teks Pidato Klaim Kemenangan Pilpres 2019”. *Jurnal Imiah Pendidikan dan Pembelajaran*, 3.
- Putri, Y. R. (2018). Argumentation in Political Interview: Critical Discourse Analysis of Abdurrahman Wahid’s Controversial Regime. *Alphabet*, 1, 1. doi:10.21776/ub.alphabet.2018.01.02.03
- Qodar, N. (2001, Juli Senin). *Liputan6.com* . Retrieved from Liputan6.com Jakarta: <https://www.liputan6.com/news/read/4019189/23-juli-2001-dekret-presiden-perlawanan-parlemen-dan-celana-pendek-gus-dur>

- Rurit, B. (2001, Mei Senin). *Maklumat Presiden Kh Abdurrahman Wahid*. Retrieved from www.Tempo.CO:nasional.tempo.co/read/29558/maklumat-presiden-abdurrahman-wahid/full&view=ok
- Sarasati, R. (2019). “Analisis Wacana Kritis dalam Pembelajaran: Peran AWK pada Pembelajaran Literasi Kritis, Berpikir Kritis, dan Kesadaran. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 3.
- Sulistiyo, S. a. (2018). “Kajian Wacana Pragmatik dalam Penggunaan Teks pPada Rambu Lalu Lintas dan Implikasi dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia Sekolah Menengah Atas”. *eprints.ums.ac.id*, 3-4.
- Widodo, J. (2018). “Meningkatkan Kemampuan Membaca Kritis Peserta Didik dengan Menggunakan Analisis Wacana Kritis (AWK). *Prosiding SENASBASA*, 3.